



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 525 3004 (8 saluran) Ext. 212, 222, Faksimile: (021) 525 3159
Laman: www.kemenkum.go.id, Pos-el: birosdm@kemenkum.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR SEK-KP.02.01-589

TENTANG
KELULUSAN AKHIR SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN ANGGARAN 2024 TAHAP II

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 3166/B-KS.04.03/SD/K/2025 tanggal 15 Juni 2025 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil Seleksi Kompetensi pada Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 (Tahap I dan Tahap II) adalah sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN I** pengumuman ini;
2. Penetapan kelulusan Peserta didasarkan pada ketentuan yaitu:
 - a. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2024;
 - b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.
3. Maksud atau arti dari kode pada kolom keterangan dalam **LAMPIRAN I** pengumuman ini adalah:
 - a. Kode “**L**” adalah Peserta **LULUS** menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024;
 - b. Kode “**R3**” adalah Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024;
 - c. Kode “**R3/L**” adalah Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Tahap I Non ASN Terdata dan dinyatakan **LULUS** menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024;
 - d. Kode “**R3b**” adalah Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II Non ASN Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024;
 - e. Kode “**R3b/L**” adalah Peserta Seleksi Pengadaan PPPK Tahap II Non ASN Terdata dan dinyatakan **LULUS** menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024;
 - f. Kode “**R4**” adalah Peserta Non ASN Tidak Terdata menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024;
 - g. Kode “**R4/L**” adalah Peserta Non ASN Tidak Terdata dan dinyatakan **LULUS** menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 347 Tahun 2024;
 - h. Kode “**TH**” adalah Peserta yang tidak hadir pada tahapan Seleksi Kompetensi PPPK Tahun Anggaran 2024 Tahap II;
 - i. Kode “**TMS**” adalah Peserta tidak memenuhi syarat pada tahapan Seleksi Administrasi.

4. Peserta yang dinyatakan **LULUS** Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 Tahap II adalah Peserta yang pada kolom keterangannya terdapat kode huruf “R3b/L” dan “R4/L”, dengan data Peserta sebagaimana tercantum dalam **LAMPIRAN II** pengumuman ini;
5. Peserta yang dinyatakan **LULUS** seleksi sebagaimana angka 4, **WAJIB** mengakses akun masing-masing Peserta pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> dan memilih opsi sebagai berikut:
 - a. **Tidak melanjutkan tahapan dan mengundurkan diri**; atau
 - b. **Melanjutkan tahapan** dengan mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan **melakukan pemberkasan**.
6. Peserta yang dinyatakan lulus dan memilih opsi mengundurkan diri, Peserta **WAJIB** mengunggah **Surat Pengunduran Diri** pada akun masing-masing Peserta pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> (format surat pengunduran diri dapat diunduh pada laman <https://casn.kemenkumham.go.id>). Posisi Peserta yang mengundurkan diri akan diisi atau diganti oleh Peserta lain berdasarkan peringkat terbaik berikutnya pada setiap kebutuhan jabatan yang bersangkutan;
7. Berdasarkan **Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 6540/B-KS.04.01/SD/E/2025 tanggal 30 April 2025** hal **Penyesuaian Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024 Tahap II**, Peserta yang dinyatakan lulus dan memilih opsi melanjutkan tahapan, **WAJIB** mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan mengunggah **kelengkapan dokumen** melalui akun masing-masing Peserta pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal **1 s.d. 31 Juli 2025**;
8. Kelengkapan dokumen yang **WAJIB diunggah** oleh Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 7, sebagai berikut:
 - a. Hasil cetak DRH dari laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id> yang pada **nama, tempat lahir, dan tanggal lahir** ditulis tangan dengan **huruf kapital/balok menggunakan pena bertinta warna hitam**, serta **ditandatangani oleh Peserta dan dibubuhi e-meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**;
 - b. **Surat pernyataan 5 (lima) poin** yang diketik dan ditandatangani dengan pena bertinta warna hitam, serta **dibubuhi meterai/e-meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://daftar-sscasn.bkn.go.id>;
 - c. **Surat pernyataan 13 (tiga belas) poin** yang diketik dan ditandatangani dengan pena bertinta warna hitam, serta **dibubuhi meterai/e-meterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://casn.kemenkumham.go.id>;
 - d. **Pas foto terbaru** menggunakan **pakaian formal** dengan **latar belakang berwarna merah**;
 - e. **Ijazah dan transkrip nilai** asli pendidikan terakhir yang dijadikan dasar saat melakukan pendaftaran;
 - f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan oleh Kepolisian Resort atau Kepolisian Daerah dan masih berlaku pada saat pengisian DRH;
 - g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari Rumah Sakit Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (tanggal surat masih dalam bulan Juni s.d. 31 Juli 2025);
 - h. **Surat keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya** dari Rumah Sakit Pemerintah dan ditandatangani oleh Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (tanggal surat masih dalam bulan Juni s.d. 31 Juli 2025);
9. Apabila **sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan** sebagaimana pada angka 7, Peserta yang dinyatakan lulus seleksi **tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 8, maka yang bersangkutan dianggap **tidak memenuhi syarat** dan/atau dianggap **mengundurkan diri** sebagai Calon PPPK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 Tahap II;

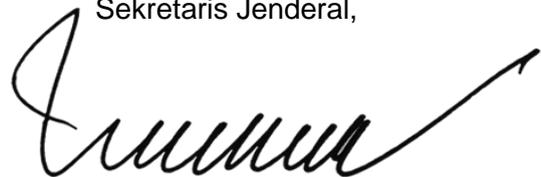
10. Dalam hal Peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi dan **telah mendapatkan persetujuan Nomor Induk PPPK kemudian mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan diberikan **sanksi tidak diperbolehkan melamar** pada Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk **2 (dua) tahun anggaran pengadaan Pegawai ASN berikutnya**;
11. **Kelulusan Peserta adalah prestasi Peserta sendiri**. Apabila terdapat pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Panitia;
12. Kesalahan dan/atau kelalaian dalam membaca serta memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta;
13. Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 Tahap II **tidak dipungut biaya**;
14. Keputusan Panitia bersifat **FINAL** dan **tidak dapat diganggu gugat**;
15. Peserta agar intens memonitor perkembangan informasi melalui:
 - a. Laman resmi: **<https://casn.kemenkumham.go.id>**;
 - b. Akun media sosial: X (Twitter) **@CASNkumham** dan Instagram **@birosdm.kemenkum**.
16. Peserta dapat melaporkan pengaduan terkait adanya kecurangan yang disertai dengan bukti pendukung pada pelaksanaan Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2024 Tahap II melalui layanan *Helpdesk* berupa pesan singkat *Whatsapp* pada nomor: **+62878 4030 2006**.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2025

Sekretaris Jenderal,



Nico Afinta